



Kinerja dan Prospek Kemiskinan

Wajah Kemiskinan Nusantara

© 2017 Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS)
Jl. Ir. H. Juanda No. 50
Perkantoran Ciputat Indah Permai A-12
Ciputat, Tangerang Selatan 15419
Telp. +62 21 7418 604
Email: info@ideas.or.id, ideas.riset@gmail.com
www.ideas.or.id

Kinerja dan Prospek Kemiskinan: Wajah Kemiskinan Nusantara

Ketua Tim:

Yusuf Wibisono

Tim Peneliti:

Anita

Rahmi Rahmawati

Vanny Achyani

Agung Nugroho

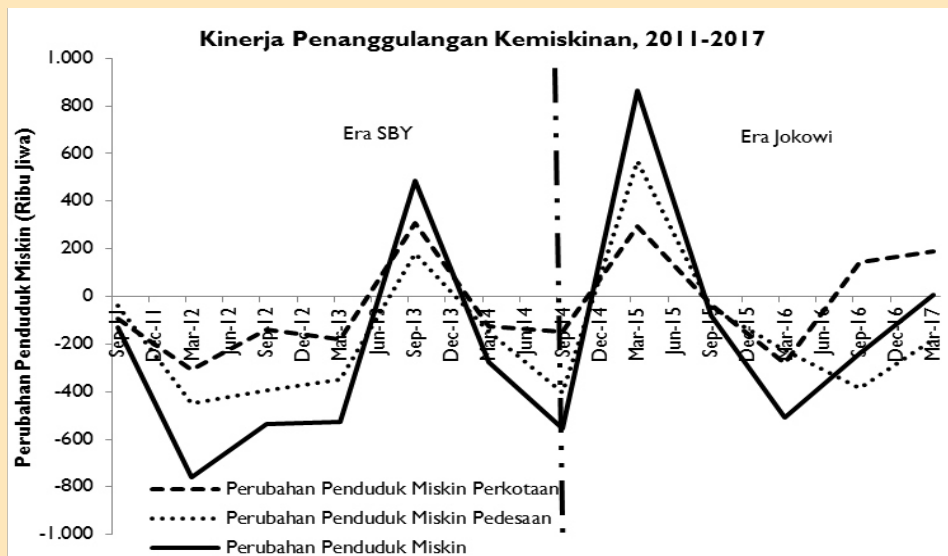
Fajri Azhari

Policy brief ini disusun oleh Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS). dengan dukungan pendanaan dari Yayasan Dompot Dhuafa. Segala temuan, interpretasi dan kesimpulan dalam *policy brief* ini tidak mewakili dan tidak mencerminkan pendapat Yayasan Dompot Dhuafa.

Kinerja dan Prospek Kemiskinan

Kinerja penanggulangan kemiskinan nasional mengalami pasang surut dalam dekade terakhir pasca berakhirnya era commodity booms. Stabilitas tingkat harga dan penciptaan lapangan kerja secara luas, terlihat masih terus menjadi kebijakan utama pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Dengan menempatkan perubahan jumlah penduduk miskin sebagai sasaran kebijakan, terlihat bahwa kinerja perekonomian nasional semakin menurun.

Bila pada periode Maret 2011 - September 2014 penduduk miskin berkurang 327 ribu orang per semester, maka pada periode September 2014 - Maret 2017 penduduk miskin hanya berkurang 85 ribu orang per semester.



Sumber: Hasil analisis staf IDEAS

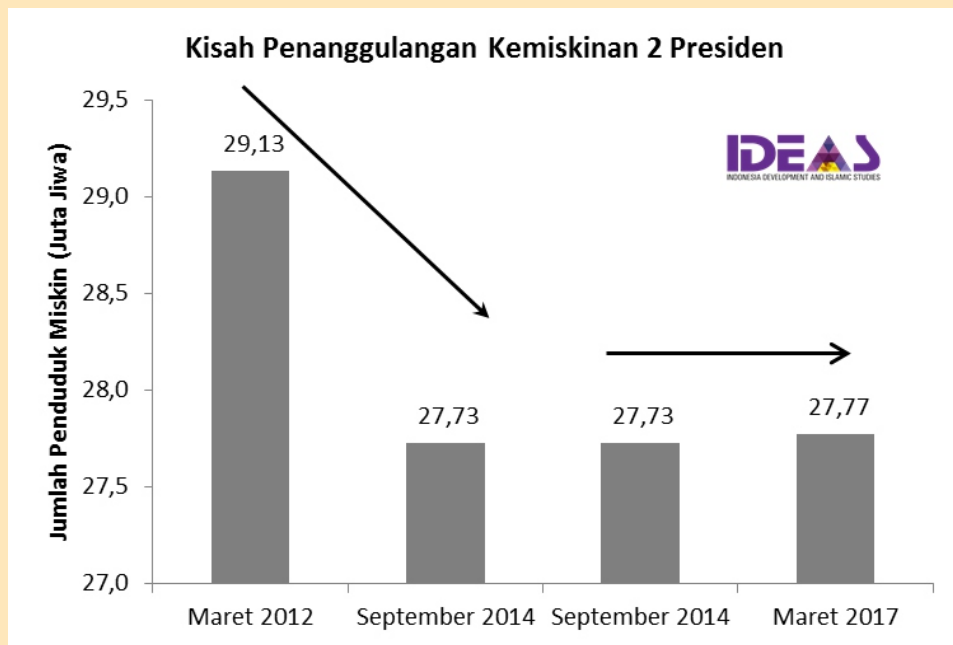
Kenaikan harga BBM pada Juni 2013 dan November 2014 terlihat berkontribusi besar pada turunnya kinerja perekonomian dalam menanggulangi kemiskinan.

Dalam 5 tahun terakhir, 2,5 tahun terakhir pemerintahan SBY dan 2,5 tahun pertama pemerintahan Jokowi, pertumbuhan ekonomi terlihat semakin tidak inklusif. Pada periode Maret 2012 – September 2014, jumlah penduduk miskin turun hingga 1,4 juta jiwa, persentase penduduk miskin terpangkas 100 basis poin menjadi 10,96%. Indeks kedalaman kemiskinan turun dan indeks keparahan kemiskinan masing-masing turun -6,9% dan -6,4%.

Pada periode September 2014 – Maret 2017, jumlah penduduk miskin justru bertambah 43 ribu jiwa meski persentase penduduk miskin turun 32 basis poin. Indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan juga meningkat, masing-masing 4,6% dan 9,1%. Berbagai pro poor measures di atas menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi semakin tidak dinikmati oleh kelompok miskin.

Bias Kota

Terdapat tendensi bahwa upaya penanggulangan kemiskinan lebih kondusif terhadap penduduk miskin di pedesaan dibandingkan di perkotaan. Pada 2,5 tahun terakhir pemerintahan SBY, jumlah



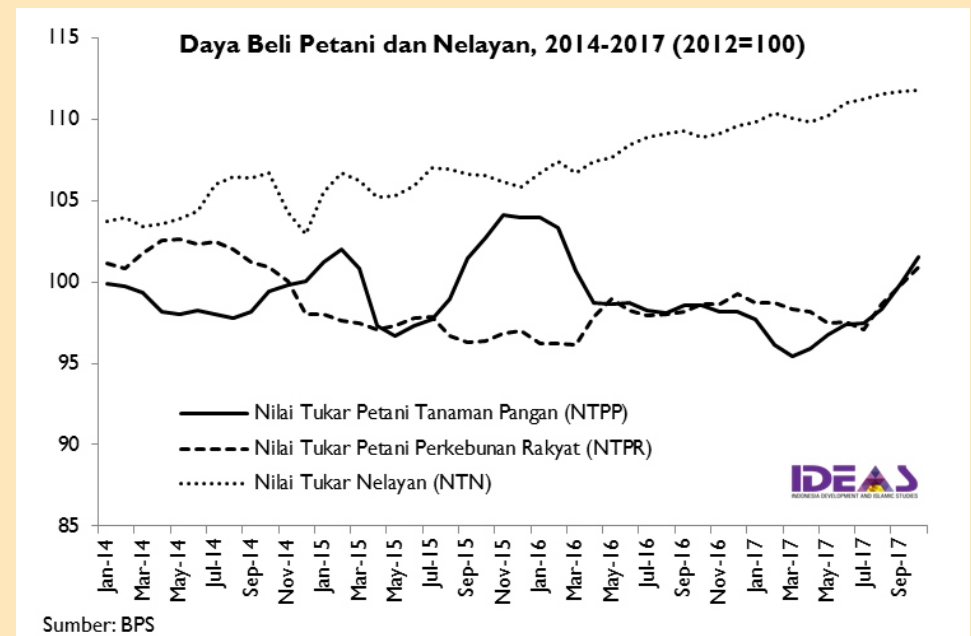
penduduk miskin di pedesaan turun 1,11 juta jiwa sedangkan di perkotaan hanya turun 290 ribu jiwa. Sedangkan pada 2,5 tahun pertama pemerintahan Jokowi, penduduk miskin di pedesaan turun 274 ribu jiwa sedangkan di perkotaan justru meningkat 317 ribu jiwa.

Namun terdapat perbedaan signifikan di dua periode ini. Pada Maret 2012 – September 2014, kedalaman dan keparahan kemiskinan perkotaan menurun drastis, masing-masing -10,7% dan -13,9%. Sedangkan pada periode September 2014 – Maret 2017, kedalaman dan keparahan kemiskinan pedesaan justru meningkat signifikan, masing-masing 10,7% dan 17,5%.

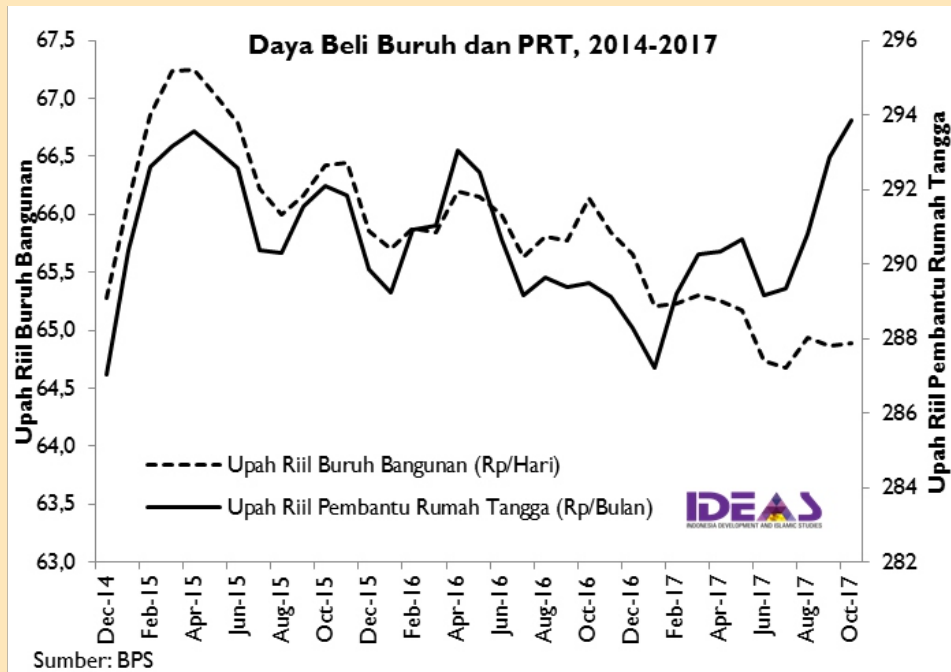
Terlihat bahwa kebijakan ekonomi SBY cenderung bias ke penduduk miskin pedesaan namun di saat yang sama tetap kondusif terhadap penanggulangan kemiskinan di perkotaan. Sedangkan kebijakan ekonomi Jokowi menunjukkan anomali, yaitu cenderung

bias ke penduduk miskin pedesaan namun membuat kondisi kemiskinan pedesaan menjadi semakin buruk.

Kondisi kemiskinan pedesaan terkini yang semakin memburuk dikonfirmasi oleh turunnya kesejahteraan pelaku di sektor tradisional pedesaan. Daya beli petani terlihat menurun dengan kecenderungan stagnan dalam 2,5 tahun terakhir. Nilai tukar petani, baik petani tanaman pangan, perkebunan rakyat maupun hortikultura, peternakan maupun pembudidaya ikan, secara umum turun, kecuali nilai tukar nelayan.



Disisi lain, kelompok miskin di sektor modern perkotaan jumlahnya meningkat karena tidak mendapat banyak manfaat dari pertumbuhan. Daya beli pelaku ekonomi bawah perkotaan cenderung melemah dalam 2,5 tahun terakhir. Upah riil buruh bangunan dan pembantu rumah tangga misalnya, secara konsisten terlihat menurun.

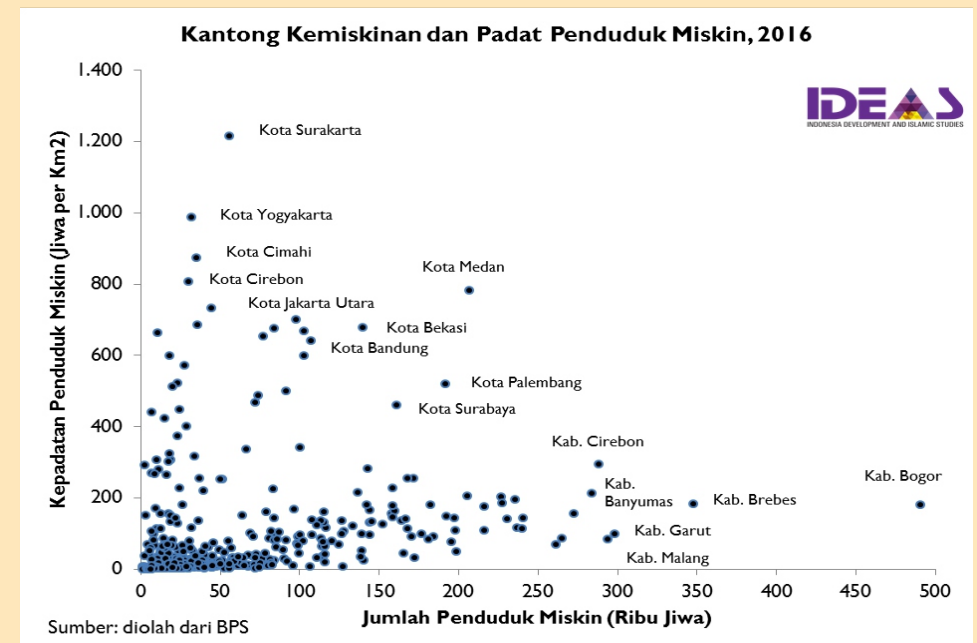


Tipologi Kemiskinan

Disagregasi analisis kemiskinan ke tingkat lokal, memberikan kita kondisi dan tantangan kemiskinan yang berbeda dari analisis nasional. Dari berbagai tipologi wilayah miskin terlihat bahwa memfokuskan ukuran kemiskinan semata pada persentase penduduk miskin (head count index – P0) akan membawa kita pada kesimpulan yang salah. Tipologi kemiskinan regional yang pertama adalah wilayah dengan jumlah penduduk miskin tinggi (kantong kemiskinan) dan wilayah dengan kepadatan penduduk miskin tinggi, indikator kemiskinan baru dari IDEAS (2017). Indikator kepadatan penduduk miskin yang dikembangkan IDEAS ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk miskin terkonsentrasi di sejumlah kecil wilayah dan sebagian kecil lainnya tersebar di wilayah yang sangat

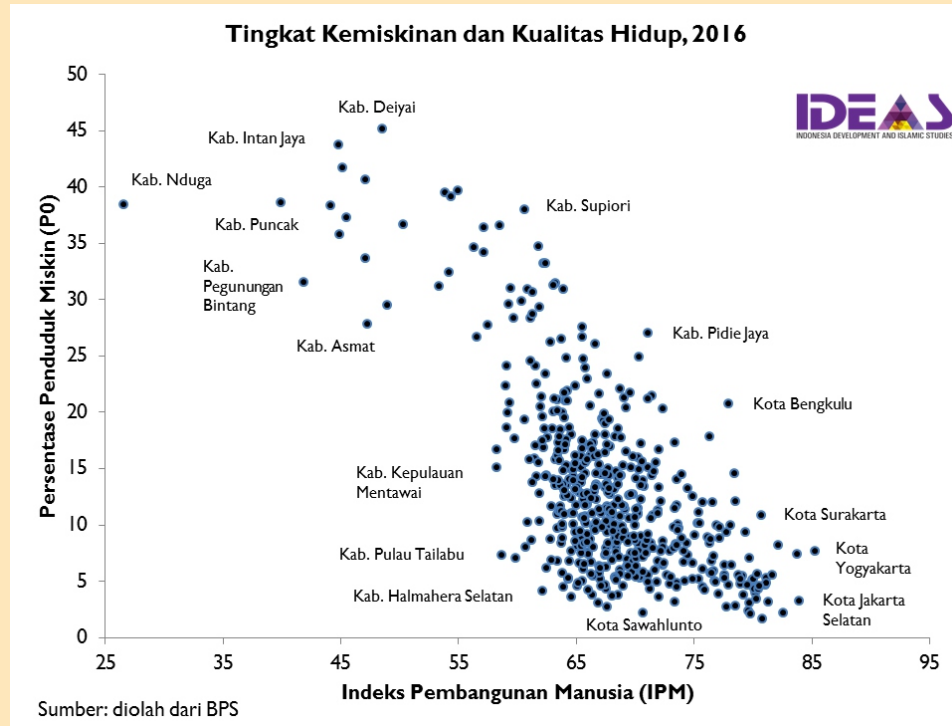
luas.

Kantong kemiskinan nasional hingga kini adalah daerah pedesaan di Jawa, antara lain Kab. Bogor, Kab. Brebes, Kab. Garut, Kab. Malang, Kab. Banyumas dan Kab. Cirebon, yang memiliki penduduk miskin lebih dari 250 ribu jiwa. Sedangkan wilayah padat kemiskinan didominasi daerah perkotaan di Jawa, antara lain Kota Surakarta, Kota Yogyakarta, Kota Cimahi, Kota Cirebon dan Kota Jakarta Utara, yang memiliki kepadatan penduduk miskin diatas 700 jiwa per km². Permasalahan paling pelik dihadapi kantong kemiskinan dengan kepadatan penduduk miskin yang tinggi, antara lain Kota Medan, Kota Bekasi, Kota Palembang dan Kota Surabaya.



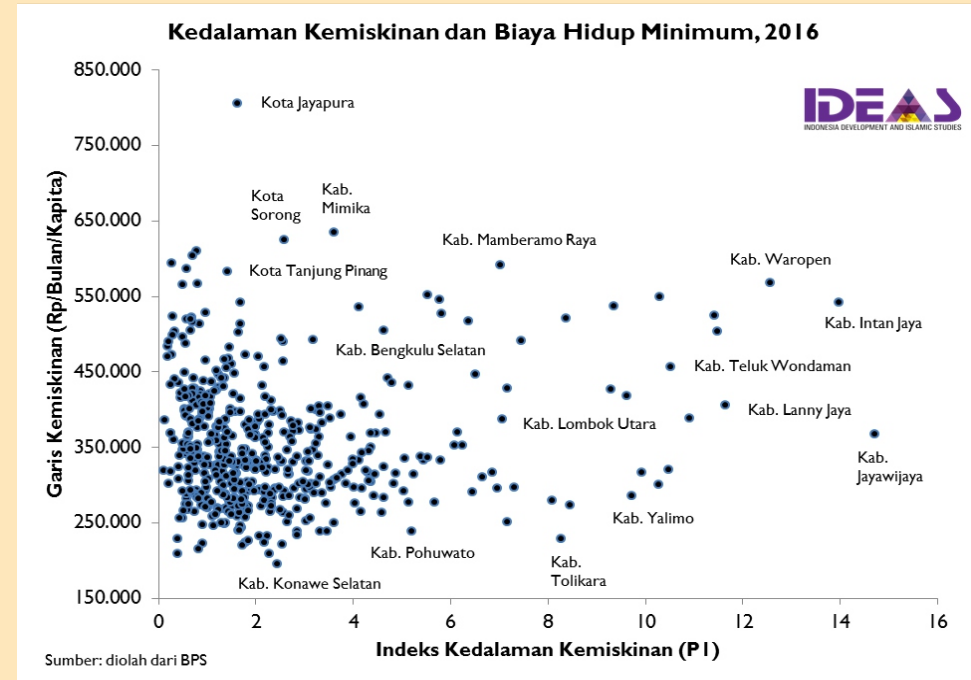
Tipologi wilayah miskin kedua adalah wilayah dengan persentase penduduk miskin (P0) tinggi dan kualitas hidup penduduk, yang diukur dengan IPM, yang rendah. Terdapat kesenjangan yang besar

disini. Wilayah dengan P0 rendah dan IPM tinggi didominasi oleh daerah kaya di perkotaan Jawa, antara lain Kota Jakarta Selatan, Kota Yogyakarta dan Kota Surakarta. Masalah terberat dihadapi wilayah dengan P0 tinggi dan IPM rendah, yang didominasi wilayah pedesaan di luar Jawa, khususnya di Papua, antara lain Kab. Nduga, Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya dan Kab. Deiyai.



Tipologi ketiga wilayah miskin adalah wilayah dengan kedalaman kemiskinan yang tinggi meskipun tingkat biaya hidup minimum adalah rendah. Wilayah ini menghadapi masalah dimana jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin sangat jauh dari garis kemiskinan meskipun garis kemiskinannya relatif rendah. Kembali wilayah dengan tipologi ini didominasi daerah pedesaan luar Jawa, terutama Papua, antara lain Kab. Jayawijaya, Kab. Lanny Jaya, Kab. Yalimo, dan

Kab. Tolikara.

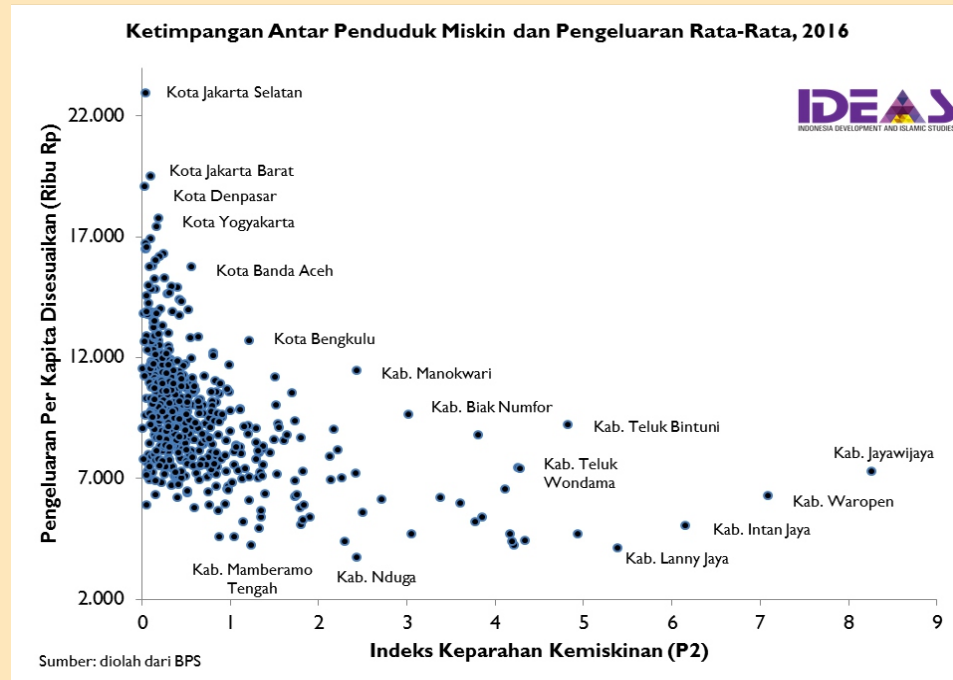


Tipologi terakhir wilayah miskin adalah wilayah dengan keparahan kemiskinan yang tinggi meskipun pengeluaran per kapita rata-rata penduduk adalah rendah. Wilayah ini menghadapi masalah dimana ketimpangan distribusi pengeluaran penduduk miskin sangat tinggi meskipun pengeluaran per kapita-nya relatif rendah. Kembali wilayah dengan tipologi ini didominasi daerah pedesaan luar Jawa, terutama Papua, antara lain Kab. Jayawijaya, Kab. Waropen, Kab. Intan Jaya, dan Kab. Lanny Jaya.

Prospek 2018

Menjelang tahun politik, kemiskinan menjadi fokus kebijakan. Jargon kebijakan fiskal banyak ditujukan ke isu sensitif ini. Sayangnya program penanggulangan kemiskinan yang mendapat penguatan

dalam APBN 2018 dominan di bantuan sosial yang rawan



ditunggangi kepentingan pragmatis jangka pendek, bukan pengembangan penghidupan berkelanjutan (sustainable livelihood). Program Keluarga Harapan yang merupakan conditional cash transfer program diperluas sasarannya dari 6 juta RTS menjadi 10 juta RTS. Bahkan skema subsidi rastra (raskin) untuk 15,6 juta RTS dirubah menjadi bantuan pangan, serupa BLT namun non tunai, yang tidak lain adalah unconditional cash transfer program. Terlepas dari motivasi politik, kebijakan afirmasi meski charity tetap adalah kabar baik untuk penanggulangan kemiskinan, walau hanya temporer.

Namun berbagai tantangan menghadang, yang tanpa antisipasi memadai, berpotensi melemahkan upaya penanggulangan kemiskinan. Perubahan iklim dan cuaca ekstrim menjadi tantangan

berat untuk stabilitas harga pangan. Di sisi lain, ke depan harga komoditas dunia berpotensi besar menguat. Meski dapat mendorong pertumbuhan dari sisi ekspor, namun hal ini juga berpotensi menciptakan tekanan pada administered price seperti harga BBM dan TDL. Dengan berbagai pertimbangan diatas, kami memproyeksikan penurunan kemiskinan pada 2018 hanya akan berjalan konservatif, di kisaran 27,52 juta penduduk miskin, atau hanya turun 250 ribu orang dari 2017 yang 27,77 juta penduduk miskin.

Wajah Kemiskinan Nusantara

Kesenjangan dalam tingkat kesejahteraan antar daerah adalah sangat lebar. Penduduk miskin secara umum sangat terkonsentrasi di Jawa. Pada 2016, kantong kemiskinan nasional terbesar, Kab. Bogor, memiliki penduduk miskin 366 kali lebih banyak dari Kota Sawahlunto, daerah dengan jumlah penduduk miskin terkecil. Dilihat dari intensitas lokasi, penduduk miskin sangat terkonsentrasi di daerah perkotaan. Kota Surakarta memiliki kepadatan penduduk miskin 9.070 kali lebih tinggi dari Kab. Malinau. Daerah perkotaan juga dicirikan dengan tingkat biaya hidup minimum yang tinggi. Garis kemiskinan Kota Jayapura 4 kali lebih tinggi dari Kab. Konawe Selatan.

Sementara itu, derajat kemiskinan antar daerah juga amat timpang. Insiden kemiskinan yang tinggi secara umum dijumpai di luar Jawa yang umumnya adalah daerah tertinggal dan terisolir.

Pada 2016, tingkat kemiskinan di Kab. Deiyai 27 kali lipat lebih tinggi dari insiden kemiskinan di Kota Tangerang Selatan. Kualitas hidup penduduk luar Jawa secara lebih rendah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yogyakarta 3 kali lebih tinggi dibandingkan Kab. Nduga. Lebih jauh lagi, kedalaman dan keparahan kemiskinan juga amat timpang. Indeks kedalaman kemiskinan Kab. Jayawijaya 123 kali lebih tinggi dari Kota Sawahlunto. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan Kab. Jayawijaya 826 kali lebih tinggi dari Kota Solok.



Kemiskinan Kota dan Desa

Dari tipologi wilayah miskin, agenda penanggulangan kemiskinan nasional memiliki dua dimensi spasial. Pertama, kantong kemiskinan dan wilayah padat kemiskinan yang sangat terkonsentrasi di Jawa, meski memiliki kelengkapan infrastruktur sosial-ekonomi. Kedua, insiden kemiskinan yang sangat tinggi dan kualitas hidup yang sangat rendah di luar Jawa, dengan bentang alam yang sangat luas dan mengalami ketertinggalan infrastruktur sosial-ekonomi serta memiliki jumlah penduduk yang sedikit.

Dari temuan ini, IDEAS membangun 2 indikator baru kemiskinan

dalam riset ini, yaitu indeks kemiskinan perkotaan dan pedesaan. Indeks kemiskinan kota (IKK) mencoba menangkap karakteristik kemiskinan wilayah perkotaan dari indikator jumlah penduduk miskin, kepadatan penduduk miskin dan garis kemiskinan. Sedangkan indeks kemiskinan desa (IKD) melihat karakteristik kemiskinan wilayah pedesaan dari indikator persentase penduduk miskin (P0), indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2).

Hasil perhitungan menunjukkan daerah dengan nilai IKK tertinggi didominasi kota-kota besar di Sumatera diikuti Jawa, yaitu Kota Medan, Kota Bekasi, Kota Palembang, Kota Tangerang dan Kota Surabaya. Kota-kota ini menghadapi masalah kemiskinan kota paling berat karena besarnya jumlah penduduk miskin, tingginya kepadatan penduduk miskin dan tingginya biaya hidup minimum. Hal ini menunjukkan pembangunan perkotaan di kota-kota inti tersebut gagal menghasilkan pertumbuhan yang inklusif.

Secara umum, Kabupaten memiliki nilai IKK rendah sedangkan Kota sebaliknya. Namun secara menarik, beberapa Kabupaten memiliki nilai IKK tinggi seperti Kab. Cirebon, Kab. Bogor dan Kab. Brebes. Sedangkan beberapa Kota justru memiliki nilai IKK sangat rendah seperti Kota Sawahlunto dan Kota Sungai Penuh.



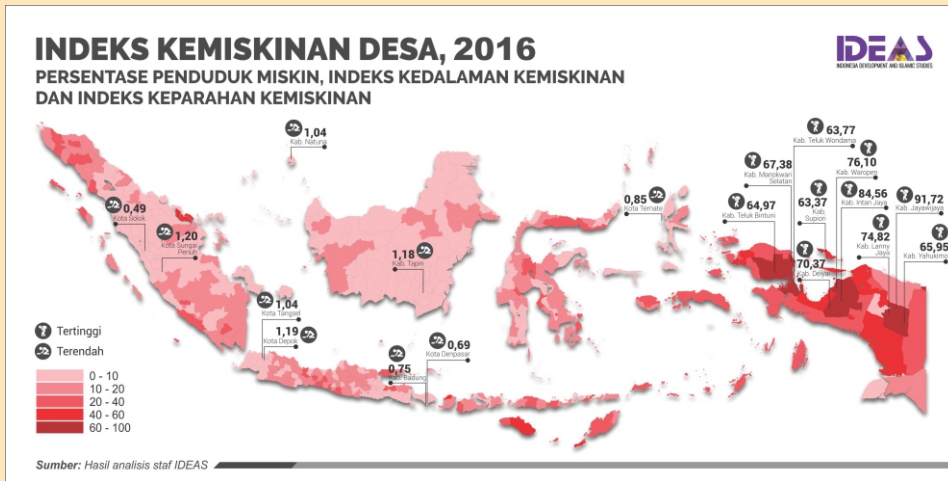
Sementara itu daerah dengan nilai IKD tertinggi didominasi daerah-daerah di Papua, yaitu Kab. Jayawijaya, Kab. Intan Jaya, Kab. Waropen, Kab. Lanny Jaya dan Kab. Deiyai. Kabupaten-kabupaten ini menghadapi masalah kemiskinan desa paling berat karenanya tingginya P0, P1 dan P2 sekaligus. Daerah-daerah di Papua Barat, Nusa Tenggara Timur dan Maluku, secara umum juga memiliki IKD yang tinggi.

Secara umum, Kota memiliki nilai IKD rendah sedangkan Kabupaten sebaliknya. Namun secara menarik, beberapa Kota memiliki nilai IKD cukup tinggi seperti Kota Konawe Kepulauan, Kota Kolaka Timur, Kota Gunungstoli dan Kota Tual. Sedangkan beberapa Kabupaten justru memiliki nilai IKD sangat rendah seperti Kab. Badung, Kab. Natuna dan Kab. Bangka Barat.

Dari identifikasi IDEAS terhadap 2 tipologi daerah prioritas untuk penanggulangan kemiskinan diatas, kami berargumen bahwa karakteristik kemiskinan 2 daerah prioritas diatas sangat berbeda, dan karena itu membutuhkan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang berbeda. Kebijakan prioritas di daerah dengan IKK tinggi adalah berfokus pada penciptaan pertumbuhan inklusif dan penghormatan atas hak-hak ekonomi warga negara, terutama hak atas tempat tinggal dan hak atas pekerjaan. Sedangkan kebijakan prioritas di daerah dengan IKD tinggi adalah berfokus pada pemenuhan hak-hak dasar warga negara dan peningkatan kapabilitas penduduk miskin.

Karakteristik Kemiskinan

Dari basis data terpadu TNP2K terakhir, diketahui penduduk dengan status sosial-ekonomi 40% terendah mencapai 22,5 juta rumah tangga, setara 82 juta jiwa, atau sekitar 32,1% dari total penduduk Indonesia. Penduduk miskin ini terkonsentrasi di Jawa Timur, Jawa

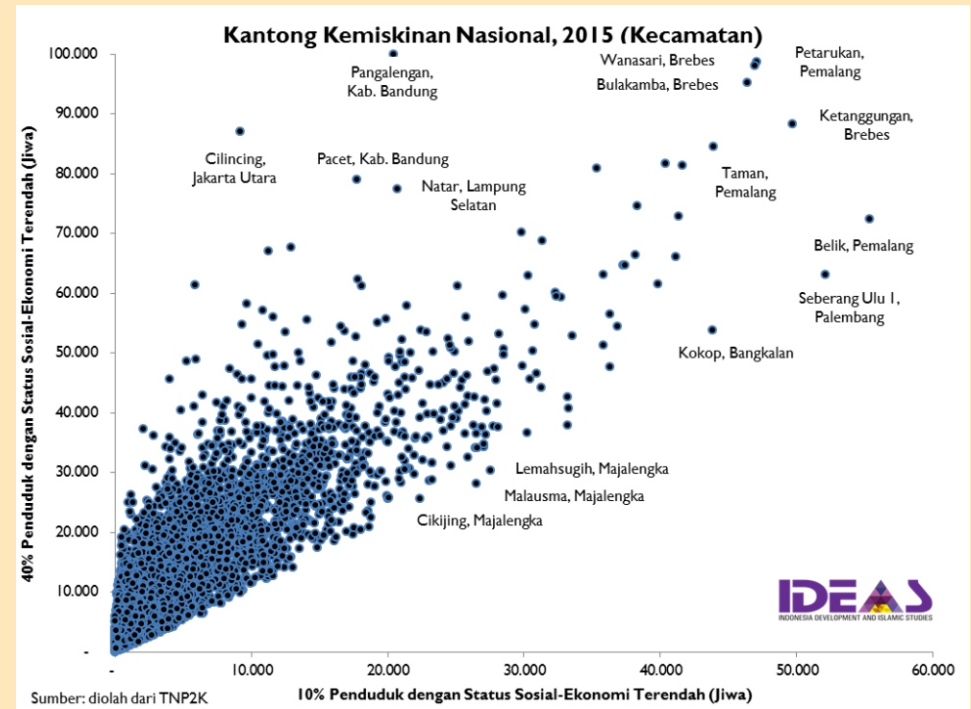


setengah dari total penduduk miskin. Kantong-kantong kemiskinan nasional ini antara lain Kab. Bogor, Kab. Brebes, Kab. Garut, Kab. Malang, Kab. Banyumas dan Kab. Cirebon.

Pengamatan lebih jauh di tingkat lokal menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi kantong-kantong kemiskinan ini adalah berbeda. Masalah kemiskinan yang lebih berat dihadapi oleh kantong-kantong kemiskinan dengan penduduk miskin didominasi oleh mereka dengan status sosial-ekonomi 10% terendah. Dari 82 juta penduduk dengan status kesejahteraan 40% terendah, 29,6 juta jiwa atau 36,1 % diantaranya berada di desil terbawah. Dari 7.098 kecamatan di seluruh Indonesia, kantong kemiskinan dengan tipologi seperti ini ditemui antara lain di Kec. Belik (Kab. Pemalang), Kec. Seberang Ulu 1 (Kota Palembang), dan Kec. Kokop (Kab. Bangkalan).

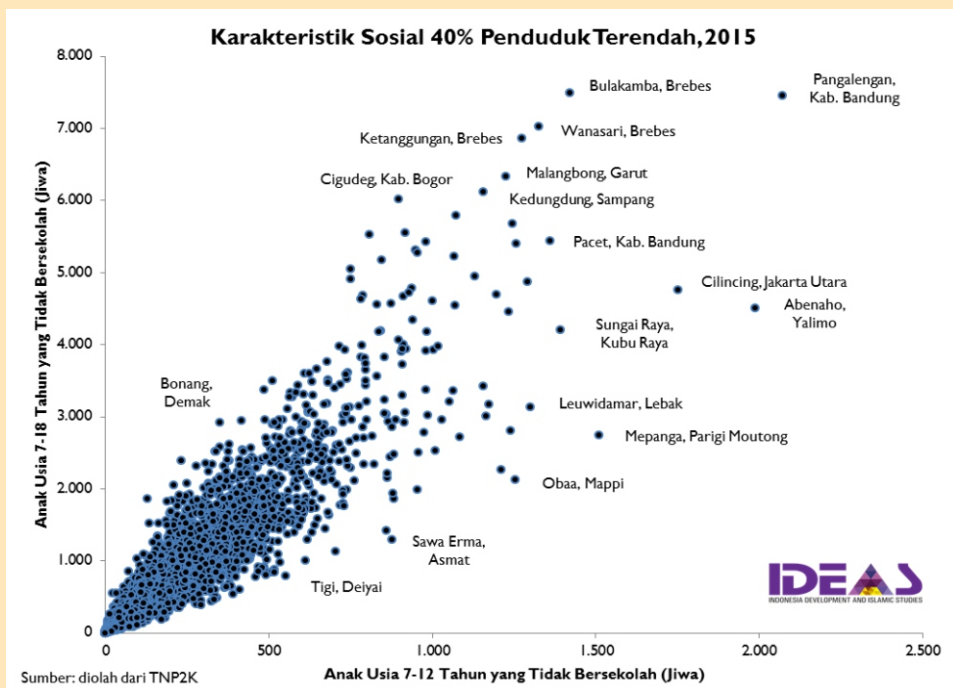
Terdapat wilayah non kantong kemiskinan dengan tipologi serupa, yaitu wilayah dimana proporsi penduduk di bottom of the pyramid adalah sangat signifikan. Kasus non kantong kemiskinan dengan insiden kemiskinan paling serius seperti ini ditemui antara lain di Kec.

Lemahsugih, Kec. Malausma dan Kec. Cikijing, semuanya berlokasi di Kab. Majalengka.



Karakteristik sosial utama rumah tangga miskin adalah tingginya tingkat putus sekolah. Dari 21,5 juta anak miskin usia sekolah (7-18 tahun), 4,6 juta diantaranya putus sekolah. Permasalahan paling serius dihadapi wilayah dengan angka putus sekolah didominasi anak usia 7-12 tahun yang bermakna wajib belajar 6 tahun-pun gagal dipenuhi.

Wilayah dengan tipologi seperti ini antara lain Kec. Abenaho (Kab. Yalimo), Kec. Cilincing (Kota Jakarta Utara) dan Kec. Pangalengan (Kab. Bandung). Pendidikan dasar, terutama usia 7-12 tahun, memiliki social return yang tinggi karena itu dibutuhkan intervensi lebih luas disini untuk memutus rantai kemiskinan.

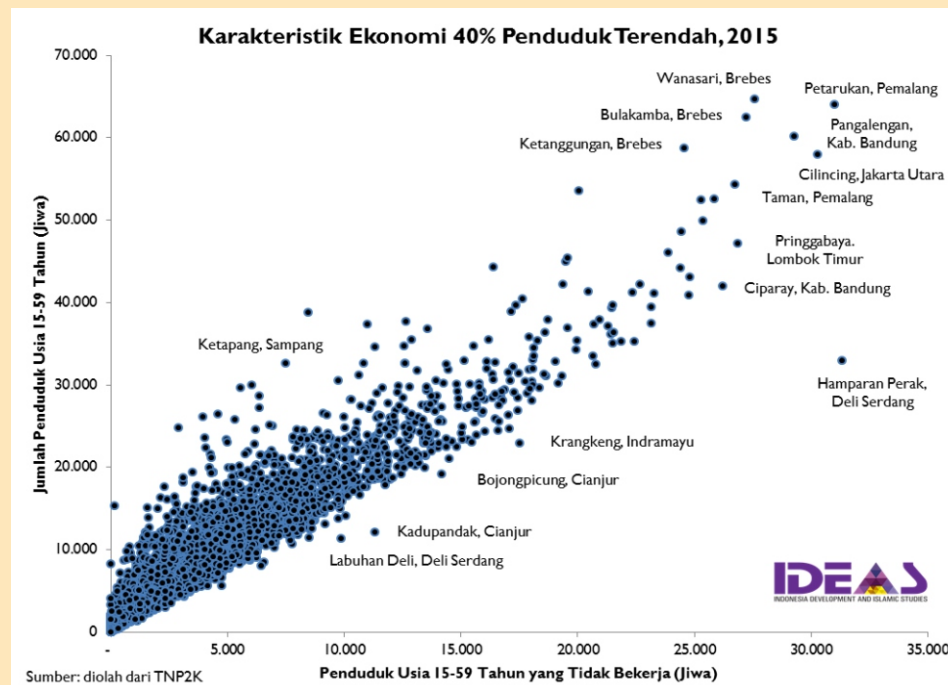


Lebih dari tiga per empat kepala rumah tangga miskin hanya berpendidikan SD dan tidak tamat SD, khususnya di daerah pedesaan.

Rendahnya tingkat pendidikan menjadi penyebab utama rendahnya modal manusia dan terbatasnya keahlian si miskin. Pada gilirannya hal ini menyebabkan rendahnya daya tawar kelompok miskin di pasar tenaga kerja, bahkan menganggur.

Sementara itu, karakteristik ekonomi terpenting rumah tangga miskin adalah tingginya tingkat pengangguran, yang ditandai oleh jumlah penduduk usia produktif, 15-59 tahun, yang tidak bekerja. Wilayah dengan jumlah pengangguran yang besar ini umum di temui di kantong-kantong kemiskinan seperti Kec. Petarukan dan Taman (Kab. Pemalang), Kec. Wanasari, Kec. Bulakamba dan Kec.

Ketanggungan (Kab. Brebes) dan Kec. Pangalengan dan Kec. Ciparay (Kab. Bandung). Semakin besar penduduk miskin usia produktif yang tidak bekerja mengindikasikan bahwa pertumbuhan daerah adalah tidak inklusif, dimana pembangunan tidak banyak menciptakan tambahan lapangan kerja bagi kelompok miskin.



Wilayah dengan masalah pengangguran paling serius ditemui di wilayah dimana sebagian besar angkatan kerja, yaitu mereka yang berada di usia produktif, berstatus tidak bekerja. Wilayah dengan tipologi seperti ini, antara lain Kec. Hampan Perak dan Kec. Labuhan Deli (Kab. Deli Serdang), Kec. Krangkeng (Kab. Indramayu), dan Kec. Bojongpicung dan Kec. Kadupandak (Kab. Cianjur). Karakteristik wilayah miskin seperti ini menunjukkan urgensi belanja sosial yang signifikan untuk meningkatkan kualitas angkatan kerja dan kebijakan afirmatif untuk penciptaan lapangan kerja secara luas.

Infrastruktur untuk Si Miskin

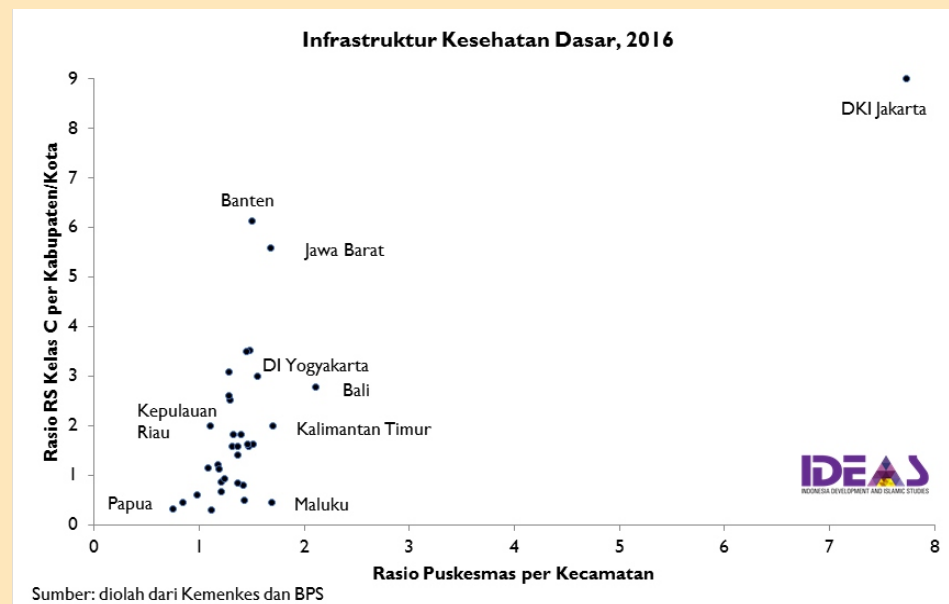
Kemiskinan secara umum dapat diturunkan melalui perluasan program perlindungan sosial, peningkatan ketersediaan dan cakupan pelayanan dasar terutama pendidikan, kesehatan, sanitasi, perumahan dan listrik, serta pengembangan penghidupan berkelanjutan pada lokasi-lokasi termiskin. Dalam perspektif ini, penyediaan infrastruktur dasar yang ditujukan untuk kelompok miskin memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas modal manusia yang secara efektif akan memutus rantai kemiskinan.

Secara mendasar, penyediaan infrastruktur pendidikan dan kesehatan secara merata untuk setiap warga negara, termasuk si miskin, adalah amanat konstitusi (Pasal 31 dan 34 UUD 1945). Karena itu, selayaknya fasilitas kesehatan dan pendidikan dasar ini tersedia secara merata di 511 kabupaten-kota, 7.098 kecamatan, dan 82.629 desa-kelurahan di seluruh negeri.

Kenyataannya, penyediaan infrastruktur kesehatan dasar secara umum belum merata. Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat 1, idealnya tersedia di setiap desa-kelurahan. Namun hingga kini, Puskesmas baru tersedia di setiap kecamatan dimana rasio puskesmas per kecamatan secara rata-rata nasional mencapai 1,4 pada 2016. RS kelas C (RSUD) idealnya tersedia di setiap kecamatan, namun baru tersedia di setiap kabupaten-kota, ditunjukkan rasio RS kelas C per kabupaten-kota yang mencapai 2,0 pada 2016.

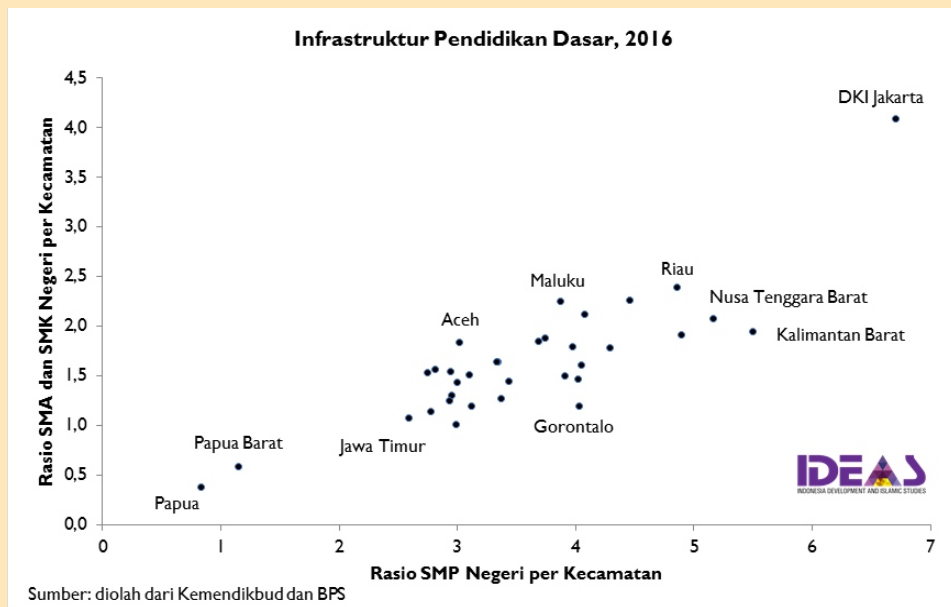
Dalam kenyataannya, ketersediaan infrastruktur kesehatan antar daerah sangatlah timpang. Di DKI Jakarta, secara rata-rata, Puskesmas telah tersedia di setiap kelurahan dan RSUD telah tersedia di setiap kecamatan. Sedangkan di Papua, sekedar 1 RSUD per kabupaten-kota dan 1 Puskesmas per kecamatan pun belum

mampu dipenuhi.



Di saat yang sama, ketersediaan infrastruktur dasar pendidikan juga masih jauh dari memadai. SD negeri secara rata-rata nasional telah berada di setiap kelurahan-desa, dimana rasio SD negeri per kelurahan-desa mencapai 1,6 pada 2016. Namun, dengan wajib belajar 12 tahun, maka SMP dan SMA-SMK termasuk infrastruktur pendidikan dasar sehingga selayaknya juga merata di setiap kelurahan-desa. Namun rasio SMP negeri per kelurahan-desa baru 0,28 sedangkan rasio SMA-SMK negeri per kelurahan-desa hanya 0,12 pada 2016.

Ketersediaan infrastruktur pendidikan antar daerah sangatlah timpang. Di DKI Jakarta, secara rata-rata, SMP negeri dan SMA-SMK negeri telah tersedia di setiap kelurahan. Sedangkan di Papua, sekedar 1 SMP negeri per kecamatan pun belum mampu dipenuhi.

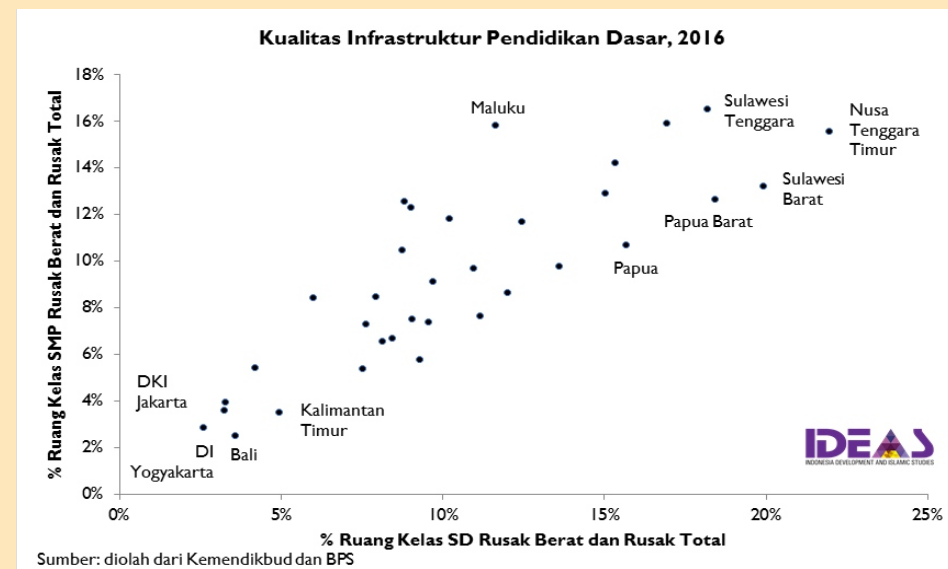


Lebih jauh, kuantitas infrastruktur pendidikan dasar ini juga tidak diimbangi dengan kualitas yang memadai. Sebagai misal, dari sekitar 1 juta ruang kelas SD negeri pada 2016, hanya sekitar 25% saja yang dalam kondisi baik, selebihnya dalam kondisi rusak, baik rusak ringan, sedang, berat hingga rusak total.

Ruang kelas dengan status rusak berat dan rusak total, dipastikan akan sangat mengganggu aktivitas pendidikan, bahkan membuatnya berhenti sama sekali. Secara ironis, daerah miskin di luar Jawa menghadapi kondisi kualitas infrastruktur pendidikan dasar paling buruk, antara lain Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara.

Di tengah hiruk pikuk pembangunan infrastruktur yang terangkum dalam 225 proyek strategis nasional senilai Rp 4.796 triliun, dengan 30 proyek infrastruktur prioritas senilai Rp 1.237 triliun, fakta-fakta diatas menyisakan rasa: ketidakadilan. Dana Rp 1 triliun cukup untuk

membangun 6.765 ruang kelas SD, atau 5.511 ruang kelas SMP, atau 4.182 ruang kelas SMA, atau 50 rumah sakit.



Tentang IDEAS

Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) adalah lembaga think tank tentang pembangunan nasional dan kebijakan publik berbasis ke-Indonesia-an dan ke-Islam-an yang didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Dompot Dhuafa.

Kegiatan inti lembaga adalah penelitian dan advokasi kebijakan dengan isu prioritas adalah penanggulangan kemiskinan dan jaminan sosial, ketahanan pangan, air dan energi, pembangunan kesehatan dan pendidikan, makroekonomi dan keuangan negara, pembangunan pertanian dan perdesaan, perencanaan kota, lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan, serta peran Islam dalam pembangunan nasional.

IDEAS berkonsentrasi pada lima wilayah kajian yaitu kajian kebijakan publik (policy brief), analisis keuangan negara (APBN dan APBD), kontra draft Undang-Undang, cetak biru kebijakan sektoral (industri), dan strategi pembangunan nasional.

Produk utama IDEAS dipublikasikan dalam 6 seri kajian utama yaitu (i) Indonesia Poverty and Inequality Report, (ii) Agriculture and Rural Development Report, (iii) Urban and Sustainable Development Report, (iv) Indonesia Pro Poor Budget Review, (v) Indonesia Economic and Social Development Review, dan (vi) Islam, Society and Social Change Review.



YUSUF WIBISONO
Direktur IDEAS



RAHMI RAHMAWATI
Peneliti IDEAS



FAJRI AZHARI
Peneliti IDEAS



VANNY ACHYANI
Peneliti IDEAS



ANITA
Peneliti IDEAS



AGUNG NUGROHO
Peneliti IDEAS



Indonesia Development and Islamic Studies



@ideas_riset



@ideas.riset



www.ideas.or.id